

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai masalah perkotaan, seperti urbanisasi dan timbulnya permukiman kumuh, telah muncul sebagai dampak dari pertumbuhan populasi yang sejalandengan pembangunan di berbagai sektor, masalah sampah, dan lain-lain. Salahsatu masalah yang sering terjadi ialah terjadi dari implikasi yang signifikan dalam pertumbuhan populasi yaitu sampah dengan meningkatnya populasi maka juga akan semakin meningkat kebutuhan maka jumlah sampah pun semakin meningkat, Penumpukan sampah menyebabkan bau tidak menyenangkan, dan ini adalah fenomena yang dapat kita saksikan hampir setiap hari. Sampah tersebut tidak berasal dari alam, melainkan muncul akibatbeberapa faktor yang saling berkaitan.

Faktor-faktor yang saling terkait, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, keamanan, perilaku masyarakat, serta isu transportasi menjadi penyebab utama terjadinyatimbulan sampah di wilayah perkotaan ini.¹ Indikator-indikator ini saling terkait dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Untuk mengatasinya, Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. sampah.

Sebagai informasi yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup KotaJambi, hanya 78% (330,58 ton) dari total timbulan sampah harian sebesar 423,45 ton di Kota Jambi telah berhasil mengangkut sampah ke TPA Talang Gulo. Sebagian besar sampah yang tidak terangkut dibakar atau dibuang di kebun atau tanah kosong milik pribadi, serta dimanfaatkan oleh bank sampah, pengepul, dan perusahaan lainnya.² Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidupdan

¹ Kahfi, A. (2017). *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu HukumFakultas Syariah dan Hukum, 4(1), 12-25. Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(1). Hal 12-25

² Terra Hakim. Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Jambi tahun 2022. Krinok: Jurnal Arsitekturdan Lingkung Bina, 1 (2), hlm 2.

Kehutanan (KLHK), diperkirakan akan ada 25,3 juta ton timbulan sampah pada tahun 2021, di mana 35,78% di antaranya tidak terkelola, dengan hanya mengalami penurunan sebesar 14,46% per tahun.³ Selain itu, Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah nasional mencapai 175.000 ton setiap hari, dengan rata-rata kontribusi individu sekitar 0,7 kg per hari. Kegiatan rumah tangga menyumbang 36% dari total produksi sampah nasional, yang menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Selain itu, jumlah sampah ini dapat dikategorikan berdasarkan berbagai jenis, karakteristik, dan sumber asalnya.

Kota Jambi merupakan sebuah kota besar dengan Jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1 juta jiwa yang menunjukkan pertumbuhan kota di setiap tahunnya⁴. Kota di Indonesia yang masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan sampah, produksi sampah di Kota Jambi mencapai 350-400 ton sampah tersebut didominasi sampah organik yang berasal dari pasar.⁵ Fakta dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah sampah merupakan isu yang sangat penting bagi Kota Jambi. Sampah memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan manusia bahkan dianggap sebagai isu kultural. Kepadatan penduduk tercatat mencapai 3.016,62 jiwa per kilometer persegi dari tahun 2010 hingga 2022. Antara tahun 2016 dan 2022, Kecamatan terbesar di Kota Jambi adalah Alam Barajo dan Paal Merah. Paal Merah, dengan jumlah penduduk sebanyak 108.182 orang, merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua.⁶ Penduduk ini tinggal di lima kelurahan, Kecamatan Paal Merah terdiri dari beberapa kelurahan, antara lain Eka Jaya, Talang Bakung, Lingkar Selatan, Payo Selicah, dan Paal Merah.

³ SIPSAN. Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.

⁴ Erick Mumtaza Juansopatrah. Analisis Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Eka Jaya. Universitas Jambi, hlm 2

⁵ Leonardus Yoka Wijanarko, volume sampah di kota Jambi mencapai 350 ton per hari.2023 <https://www.rri.co.id/daerah/332920/volume-sampah-di-kota-jambi-mencapai-350-ton-per-hari> rri.co.id diakses 10 maret 2024

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam Angka Tahun 2023, hlm 54

Kecamatan Alam Barajo memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah, yaitu 2.722,47 orang per km², dibandingkan dengan Kecamatan Paal Merah yang memiliki kepadatan 3.987,54 orang per km².⁷ Karena populasinya lebih padat dibandingkan dengan Alam Barajo, Kecamatan Paal Merah menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih signifikan. Hal ini meningkatkan risiko bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Sehubungan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk tersebut tercatat Kecamatan Paal Merah mengalami alam meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019, jumlah timbulan sampah di Kecamatan Paal Merah mencapai kecamatan ini mencapai 63.968,10 kg per hari, menempati posisi kedua tertinggi. Kemudian, pada tahun 2020, timbulan sampah meningkat menjadi 74.134,20 kg per hari, dan pada tahun 2021, angka ini kembali naik menjadi 74.688,6 kg per hari, juga menempatkannya sebagai yang kedua tertinggi.⁸ Selanjutnya pada tahun 2022 estimasi timbulan sampah sebanyak 75.727,4 kg/hari. Kemudian Kelurahan Eka Jaya, yang memiliki 31.402 warga, adalah kelurahan dengan populasi terbanyak di Kecamatan Paal Merah, dengan timbulan sampah mencapai 22 ton per hari.⁹

Menurut data tahun 2022, Kota Jambi adalah kota terbesar di Provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk sekitar 612.162 jiwa pada tahun 2021. Kepadatan penduduknya sekitar 2.980,63 jiwa per km², dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat mencapai 0,98% antara tahun 2020 dan 2021.¹⁰ Sekitar 418,91 ton sampah dihasilkan setiap hari di Kota Jambi.¹¹ Tabel berikut menyajikan Jumlah

⁷ Ibid., hlm.55

⁸ Sumiyarsih. Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun 2022. Universitas Jambi, hlm 5.

⁹ Erick Mumtaza Juansopatrah, op.cit. hlm 6.

¹⁰ Kompas.com, "Profil Kota Jambi, Ibu Kota Provinsi Jambi", diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/08/10/182250878/profil-kota-jambi-ibu-kota-provinsi-jambi?page=all>, tanggal akses 12 April 2024

¹¹ Antaranews, "Pada 2021 Jambi targetkan pengurangan sampah 173,2 ton per hari", diakses melalui <https://jambi.antaranews.com/berita/436902/pada-2021-jambi-targetkan-pengurangan-sampah-1732-ton-per-hari#:~:text=Timbulan%20sampah%20terbesar%20dihasilkan%20oleh,sampah%20di%20masing%20daerah>, tanggal akses 10 Oktober 2023

sampah yang diproduksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2022, menurut data yang tersedia, adalah 418,91 ton per hari. kecamatan:

Tabel 1.1
Jumlah Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Total volume sampah (M3/Hari)	Volume sampah terangkut ke TPA(M3/Hari)	Volume sampah terolah di TPS 3 R dan bank sampah/Hari (M3/Hari)	Volume sampah yang terkelola/Hari(M3)	Persentase sampah yang tertangani(%)
1.	Kota baru	77.031	200.28	50.21	10.01	160.22	80.00%
2.	Alam Barajo	96.678	251.36	178.47	15.08	193.55	77.00%
3.	Jambi Selatan	62.350	162.11	114.29	6.48	120.77	74.50%
4.	Pall Merah	90.583	235.52	164.86	7.07	171.93	73.00%
5.	Jelutung	64.171	166.85	133.48	1.67	135.14	81.00%
6.	Pasar Jambi	12.810	33.31	30.31	2.00	32.31	97.00%
7.	Telanaipura	50.975	132.53	99.40	13.25	112.65	85.00%
8.	Danau Sipin	48.697	126.61	88.63	0.63	89.26	70.50%
9.	Danau Teluk	12.278	31.92	22.35	0.16	22.50	70.50%
10.	Pelayangan	13.740	35.72	25.01	0.71	25.72	72.00%
11	Jambi Timur	67.371	176.10	132.07	5.28	137.36	78.00%
		597.043	1.552.31	1.139.07	62.36	1.201.42	77.40%

Sumber Data: Laporan Kinerja DLH Kota Jambi Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Jambi diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah pada tahun 2022. Kecamatan Paal Merah, yang memiliki populasi sebanyak 90.583 warga, menghasilkan sekitar 235,52 meter kubik sampah setiap harinya. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan sampah. karena beberapa alasan. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Daerah tersebut, pengelolaan sampah mencakup upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan mengelolanya dengan baik. Menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah meliputi upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang

dihasilkan, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali. Sementara itu, penanganan sampah mencakup berbagai tahap seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan proses akhir dari sampah.

Guna mengatasi masalah sampah di kawasan permukiman, penanganan sampah di Kota Jambi perlu dilakukan dengan baik dan melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, berbeda dengan Telanaipura dan Jambi selatan pengelolaan sampah di Kota Jambi di serahkan kepada masing-masing kecamatan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sampah dari sumber hingga ke TPA sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dari sumber sampai ke TPA.¹²

Prinsip tata kelola kolaboratif, mengacu pada keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Menurut Undang-undang pengelolaan sampah No.18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa dari proses alami dari aktivitas sehari-hari manusia.¹³ Pada praktik pengelolaan sampah setiap daerah memiliki berbagai metode digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengurangi jumlah sampah. Contohnya, sistem pengelolaan sampah masih terbatas Di negara berkembang, terdapat perbedaan dengan negara maju, di mana negara maju umumnya praktik pengelolaan sampah nya telah memiliki output yang bernilai Produktif dan berharga. Negara berkembang berpendapat Sampah diartikan sebagai barang yang telah rusak dan tidak lagi memiliki nilai guna memiliki nilai jual, serta dianggap menjijikan sehingga pada proses pengelolaan sampah hanya dibakar atau dibuang di tempat pembuangan

¹² Cr 04, Sekda bakal evaluasi penanganan sampah di dua kecamatan 2023
<https://jambiprima.com/read/2023/12/23/17581/sekda-bakal-evaluasi-penanganan-sampah-di-dua-kecamatan/Jambi-Prima.com> di akses 6 maret 2024

¹³ P. R. INDONESIA, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.', 2008 <widyacipta.com>.

sampah.¹⁴

Peraturan Daerah UU No. 5 Tahun 2020 Kota Jambi mengatur tentang pengelolaan sampah. Salah satu aspeknya adalah Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah kering yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Melalui sistem ini, sampah yang bernilai ekonomi dikumpulkan, dipilah, dan disalurkan ke pasar, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menabung sampah.¹⁵ Pada tahun 2023 Kota Jambi tepatnya di kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah meluncurkan sebuah program bank sampah sikhumbang (bersihkan,kumpulkan,timbang) bank sampah sikhumbang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan serta mengelola sampah organik maupun non organik menjadi barang yang berguna serta memiliki nilai jual.dengan mendukung program bank sampah sikhumbang diharapkan masyarakat khususnya kelurahan Eka Jaya kecamatan pall merah dapat mengelola sampah dengan baik, program Bank sampah sikhumbang adalah inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, masyarakat diimbau untuk membersihkan, mengumpulkan, dan menimbang sampah di tempat-tempat yang telah ditentukan. sampah yang terkumpul kemudian diolah dan dijual kepada pihak daur ulang untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terlibat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan melalui cara sarana bandingkan serta eksplorasi materi pembelajaran.kika temuan penelitian yang dilakukan sebagai dasar pembandingan tidak

¹⁴ Mulasari, S. A. (2013). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengolah Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 6(3). <https://doi.org/10.12928/kesmas.v6i3.1055>

¹⁵ Perda No.5 Tahun 2020 "Tentang Pengelolaan Sampah"

tergantung pada subjek penelitian, yaitu mengenai *collaborative governance* pengelolaan sampah pada program bank sampah sikhumbang.

Tabel 1.2
Data Penelitian relevan

NO	Judul Penelitian, Penulis, dan Tahun Penerbitan	Hasil Kajian	Kontribusi Terhadap Penelitian Yang Dilakukan dan Perbedaan dengan Penelitian Skripsi
1.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah, Niluh Eka, 2023	<p><i>Collaborative Governance</i> sudah cukup optimal. Hal ini disebabkan oleh pembentukan dan pelaksanaan proses kerja sama antara pemerintah, yang tercermin dalam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Para pemangku kepentingan memiliki komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi berkat semangat awal untuk menyelesaikan masalah. 2) Kepemimpinan fasilitatif dapat dipegang oleh satu individu dalam rangka mendukung upaya kerja sama. 3) Struktur TPST Samtaku di Kabupaten Lamongan tidak berjalan dengan efektif. 4) Forum tidak sering melakukan diskusi langsung dalam beberapa waktu terakhir. 5) Organisasi belum mencapai kemajuan yang memadai dalam menciptakan budaya yang mendukung kepercayaan di antara anggotanya. 6) Terdapat dorongan yang kuat untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. 7) Masih terdapat kesenjangan komunikasi antara masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. 8) Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa tujuan kemitraan telah tercapai. Namun, masih terdapat hambatan, dan sektor swasta terus mempertanyakan masalah ini. 	<p>a. Dari penelitian ini dapat menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitiannya, karena dalam penelitian ini ditemukan berbagai masalah dalam proses kegiatan <i>Collaborative governance</i> mulai dari perilaku dan tanggapan negatif dari aparatur pemerintahan hingga masyarakat yang kurang kompeten hingga sulit untuk melakukan kerjasama dengan aparatur, hal ini dapat memberikan gambaran pada peneliti terkait seperti apa saja hambatan yang akan dilalui dalam <i>Collaborative Governance</i>.</p> <p>b. Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam kategori atau jenis penelitian tertentu. Niluh Eka 2023 fokus utama dalam penelitiannya adalah seluruh kegiatan <i>collaborative governance</i> di TPST Kabupaten Lamongan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus utama yang diteliti adalah <i>collaborative governance</i> yang ada dalam lingkup kelurahan Eka Jaya.</p>
2.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penyelesaian Masalah Sampah Di Kota Bekasi	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi	a. Dari penelitian ini dapat menambah wawasan dari peneliti mengenai seperti pola

	Provinsi Jawa Barat, Rezky Muhammad, 2023	Provinsi Jawa Barat sudah ada dan sudah berjalan namun belum mencapai tujuan utama dan belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat kurangnya kordinasi antar pihak, kurang optimalnya prosesl pengelolaan sampah khususnya pengangkutan sampah masih mengalami kekurangan karna faktor kurangnya armada, dan petugas kebersihan, serta masih banyak titik tempat pembuangan ilegal yang ada. Masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Bekasi walaupun memang sudah beberapa partisipasi kolaborasi antara Dinas dengan masyarakat dalam mengelolanya. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses collaborative berasal dari internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah lebih mengoptimalkan keterkibatan pihak ketiga dalam pengelolaan persampahan agar berjalan dengan efektif.	penelitian Kualitatif Deskriptif dalam melakukan penelitian mengenai <i>Collaborative Governance</i> . b. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian yang telah dilakukan Rezky Muhammad 2023 adalah dalam penelitian Rezky Muhammad fokus utama dalam penelitiannya adalah masalah penyelesaian sampah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus utama yang diteliti adalah seluruh rangkaian <i>collaborative governance</i> pengelolaan sampah.
3.	<i>Collaborative governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna, Dian Herdiana , 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat telah berjalan dengan baik. Namun, pada kondisi awal, masih terdapat kegagalan dalam komunikasi dan penanganan konflik di masyarakat. Meskipun demikian, proses kerja sama telah berlangsung dengan baik, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat, LSM, komunitas lainnya, dan perusahaan.	a. Dari penelitian ini dapat menambah refrensi peneliti dalam melakukan penelitiannya karena dalam penelitian ini indikator penelitian yang digunakan sama dengan indikator yang digunakan peneliti yaitu teori Ansel & Gash (2007): <i>Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership, Institutional Design</i> . b. Perbedaan dengan penelitian Dian Herdiana terletak pada dalam penelitian yang telah dilakukan Dian Herdiana 2022 fokus utama penelitiannya adalah seluruh

			<p>rangkaian collaborative governance dalam lingkup satu kecamatan sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Kelurahan.</p>
4.	<p><i>Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Djogeh Harmana, 2021</i></p>	<p>Sebuah penelitian yang berjudul "Pengelolaan Sampah Berbasis Kolaborasi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara" mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Tarakan masih belum efektif. Penelitian ini menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, yang disebabkan oleh perspektif yang berbeda antara kedua belah pihak. Dalam upaya memperbaiki lingkungan, pihak swasta hanya memberikan dana tanpa mengetahui secara jelas bagaimana dana tersebut akan digunakan. Di sisi lain, pemerintah bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan. Namun, tidak hanya itu Salah satu penyebab utama adalah rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berbasis kerja sama dengan pemerintah.</p>	<p>a. Dari penelitian ini dapat menjadi acuan referensi pengerjaan penelitian karena didalam penelitian ini membahas pengelolaan sampah berbasis Collaborative governance yang sama dengan objek Yang akan diteliti oleh peneliti, serta yang akan dibahas dalam penelitian ini, mencakup tahapan demi tahapan dijelaskan dengan sangat terstruktur yang sangat memudahkan peneliti dalam menjadikannya referensi.</p> <p>b. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti yang dilakukan Djogeh Harmana adalah dalam penelitian Djogeh Harmana 2021 seluruh hasil collaborative governance yang dilakukan di kota tarakan seluruhnya belum berjalan maksimal sedangkan dalam penelitian dari peneliti kegiatan collaborative governance ada yang sudah berjalan baik dan ada beberapa yang belum berjalan terlalu baik.</p>

Berdasarkan uraian yang mengacu pada penelitian terdahulu di atas, kemudian dibandingkan dengan rancangan penelitian ini untuk memenuhi kebaruan dan menentukan dimanakah posisi dari penelitian ini, maka dari beberapa penelitian yang diambil untuk dijadikan bahan tinjauan penelitian terdahulu yakni memiliki kesamaan tema mengenai *Collaborative Governance*. Sedangkan, nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasikan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah dengan mengadopsi teori Ansell and Gash sebagai pisau analisisnya. Dengan demikian, nantinya dapat dirumuskan proses dan hasil *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pall Merah Kelurahan Eka Jaya oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul. “*COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH SIKHUMBANG DI KELURAHAN EKA JAYAKECAMATAN PALL MERAH*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah sikhumbang di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah?
2. Bagaimanakah hasil *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah sikhumbang di Kelurahan Eka Jayan Kecamatan Pall Merah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah sikhumbang di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah sikhumbang di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pembaca, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil studi ini mungkin bermanfaat mengembangkan dan memberikan sumbangan Ilmu sosial dan politik secara umum dan pemahaman pada bidang ilmu pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam program bank sampah sikhumbang .
- b. Selain sebagai data, juga sebagai literatur atau sumber data ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori dalam ilmu pemerintahan saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Berguna regarding mengemangkan kemampuan peneliti, memberi wawasan kepada pembaca konsep kolaborasi yang melibatkan seluruh komponen *governance* dalam pengimplementasi program bank sampah.
- b. Memberikan masukan kepada pihak terkait yaitu pemerintah Jambi maupun pemerintah daerah sebagai pengembangan informasi dalam hal *Collaborative Governance* program bank sampah sikhumbang .

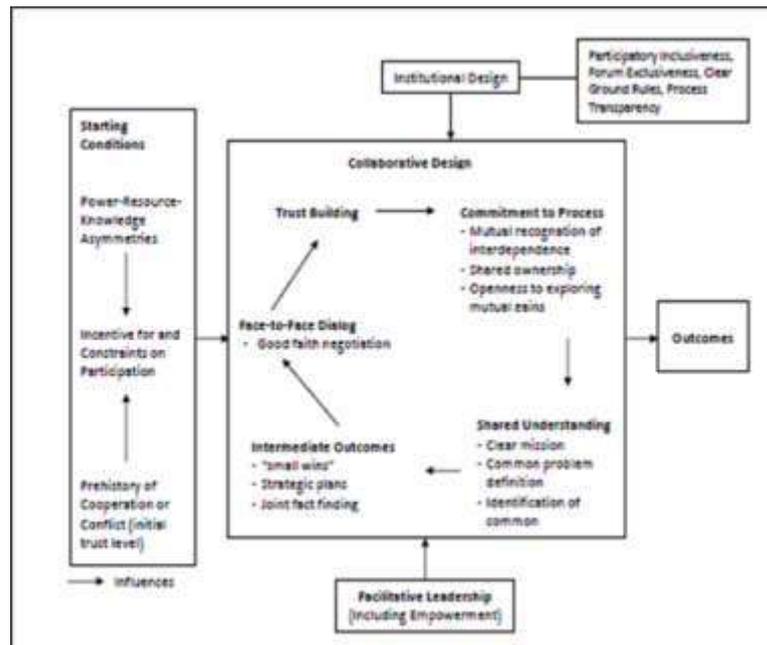
1.5 Landasan Teori

1.5.1 collaborative governace

Istilah “kolaborasi” berasal dari bahasa Inggris, yang artinya “*colabour*” yang berarti bekerja sama, dan dalam bahasa publik, istilah dari *governance* yang biasanya digunakan untuk menggambarkan organisasi yang terlibat dalam kegiatan publik atau mungkin *collaborative governance* adalah lebih menunjukkan model pengendalian yang mengadopsi proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada persetujuan dan pertimbangan yang disebut kolaboratif, satu atau lebih organisasi public terlibat secara langsung *stackholder* non-negara dalam proses formal pengambilan keputusan kolektif, berorientasi pada kesepakatan serta pertimbangan, dengan tujuan mengelola program atau , membuat atau menerapkan kebijakan publik, dan sebagainya.

A) **Kolaborasi menurut pendapat Ansell dan Grash (2007:545)**

“*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”. *collaborative governance* dapat dianggap sebagai salah satu tipe manajemen, konsep ini menekankan pentingnya kondisi di mana para pelaku, baik dari sektor publik maupun swasta, bekerja sama dengan cara dan proses tertentu untuk merumuskan kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang tepat bagi masyarakat atau publik. Pengertian Hal ini menunjukkan bahwa di sektor pemerintahan, untuk kepentingan masyarakat, aktor publik (pemerintah) dan swasta (perusahaan atau organisasi) saling bekerja sama. Terdapat empat variable utama yakni,:(1) kondisi awal (2) desain kelembagaan (3) kepemimpinan dan (4) proses kolaborasi (Ansell dan Gash,2008)



Gambar 1.1 Model Collaborative Governance menurut Ansell And Gash

1) Kondisi awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2)Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah

legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4) Proses kolaboratif

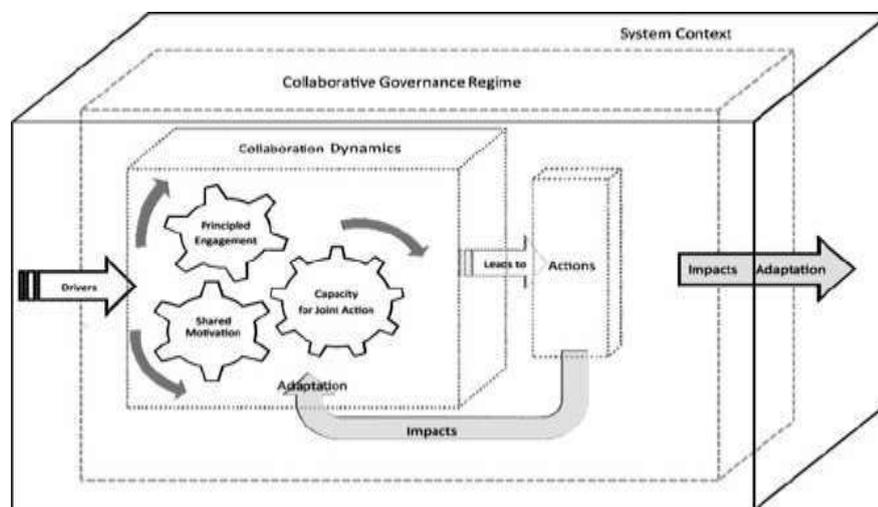
- a. Dialog tatap muka, semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

- a. Membangun kepercayaan, tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.
- b. Komitmen, dalam proses kolaborasi Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
- c. Pemahaman bersama Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.
- d. Hasil sementara, kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi pendorong

dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

B) Kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi & Balogh

Tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai proses dan struktur dalam pengambilan keputusan serta manajemen kebijakan publik yang melibatkan masyarakat di antara lembaga publik, swasta, dan komunitas untuk mencapai kepentingan umum yang tidak dapat diraih tanpa keterlibatan pihak swasta dan komunitas.¹⁶ Emerson, Nabatchi, dan Balogh mengembangkan kerangka integrative untuk *collaborative governance* ke dalam dimensi-dimensi yaitu collaborative governance regime (menggambarkan proses kolaborasi itu sendiri), drivers, system context, dan impact or adaptation.



Gambar 1.2 Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012)

¹⁶ Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.

1. Dinamika kolaborasi

Tahapan dalam dinamika kolaborasi dilihat sebagai interaksi berulang meliputi Pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas dalam melakukan tindakan bersama yang saling mempengaruhi. Adapun penjelasan dari diatas yaitu:

a. Pergerakan prinsip bersama (*principled engagement*)

Pergerakan prinsip bersama adalah proses yang senantiasa berulang- ulang dan melibatkan actor yang berbeda pada waktu yang sama dengan cara seperti dialog, jaringan lintas organisasi, maupun dengan pertemuan antara sector public maupun privat atau cara-cara yang lain. Melalui pergerakan prinsip bersama terjadi penegasan kembali tujuan bersama dan pembentukan serta pengembangan prinsip-prinsip bersama sehingga inti dari pergerakan prinsip bersama adalah peyatuan prinsip dan tujuan. penting pula untuk memperhatikan partisipan dalam komponen ini, siapa saja yang terlibat dan apa representasinya dalam kolaborasi, karakteristik masing-masing actor mempengaruhi seberapa jauh bersama adalah penyatuan prinsip dan tujuan.

1) Pengungkapan (*discovery*)

Pengungkapan adalah penyampaian kepentingan, perhatian, dan nilai individu dan nilai bersama. Pada awalnya pengungkapan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama. Kemudian, hal itu dilihat sebagai proses pencarian fakta bersama dan penyelidikan yang lebih analitik.

2) Pengertian(*definition*)

Proses pengertian ditandai dengan upaya terus menerus untuk membangun makna bersama dengan mengartikulasikan tujuan dan sasaran bersama, menyetujui konsep dan terminologi yang akan digunakan para *stakeholders* untuk mendeskripsikan dan mendiskusikan masalah dan peluang kolaborasi, mengklarifikasi dan menyesuaikan tugas dan harapan satu sama lain, serta menetapkan kriteria bersama untuk menilai informasi dan alternatif tindakan.

i. Deliberasi(*deliberation*)

Melalui musyawarah atau komunikasi yang jujur dan beralasan, dianggap sebagai ciri dan unsur penting dari penggerakan prinsip bersama yang sukses. Kualitas dari musyawarah, terutama bila partisipan atau peserta memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda, bergantung pada pemimpin kolaborasi yang peka terhadap kepentingan individu, kepentingan yang diwakili, efektivitas strategi dan adanya konflik.

ii. Determinasi(*determination*)

Serangkaian tindakan untuk menetapkan maksud dan tujuan yang diinginkan yang dibedakan menjadi determinasi bersama (*joint determinations*) dan determinasi substansif (*substantive determinations*). Determinasi bersama meliputi keputusan prosedural seperti agenda kerja, diskusi, dan penugasan sebuah tim kerja. Sedangkan determinasi substantif sering dianggap sebagai salah satu output atau produk akhir kolaborasi seperti kesepakatan mengenai tindakan atau rekomendasi akhir

b.Motivasi Bersama

Motivasi bersama diartikan sebagai siklus penguatan atas kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Ketiga elemen kecuali legitimasi telah ada dalam model *collaborative governance* Ansell dan Gash. Seperti yang divisualisasikan oleh roda penggerak, motivasi bersama melakukan sebuah siklus sendiri dan sebelumnya dipengaruhi oleh pergerakan prinsip Bersama.

1. Kepercayaan bersama (*mutual trust*)

Kata mutual menandai bahwa kepercayaan haruslah dibuat secara sama dan merata sehingga saling menguntungkan setiap aktor kolaborasi. Pembentukan kepercayaan bersama artinya harus ada rasa percaya di setiap aktor kolaborasi. Kepercayaan dibangun dengan upaya terus menerus dari interaksi para aktor untuk saling mengetahui satu sama lain dan membuktikan sendiri kelayakan untuk dipercaya. Kepercayaan juga dipengaruhi saling ketergantungan antar aktor, hubungan antar aktor di luar kolaborasi dan pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor yang lain.

2. Pemahaman bersama (*mutual understanding*)

Pemahaman bersama (*mutual understanding*) disini berbeda dengan shared understanding yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash. Shared understanding merujuk pada persetujuan setiap partisipan kolaborasi untuk berbagi serangkaian nilai dan tujuan. Sedangkan mutual understanding merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menghargai kedudukan dan kepentingan pihak lain ketika salah satu pihak tidak setuju. Pemahaman bersama seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya.

3. Legitimasi Internal (*Internal legitimacy*)

Legitimasi internal adalah pengakuan dari pihak-pihak internal kolaborasi bahwa aktor-aktor yang terlibat dapat dipercaya dan kredibel dalam melakukan tugas dan perannya dalam kerangka kolaborasi. Legitimasi internal ini penting karena merupakan elemen untuk membentuk komitmen bersama.

4. Komitmen (*shared commitment*)

Komitmen mampu menghilangkan hambatan yang muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen dalam model CGR ini serupa dengan *commitment to the process* dalam *collaborative governance* Ansell dan Gash.

a. Kapasitas dalam melakukan tindakan

Kolaborasi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang tidak dapat atau sulit dicapai sendiri. Namun, aktor kolaborasi tidak selalu memiliki kapasitas yang sama untuk bertindak bersama dalam rangka mencapai tujuan karena adanya perbedaan dan kesenjangan kekuatan. Dengan demikian, kolaborasi harus menghasilkan kapasitas baru untuk tindakan bersama yang tidak ada sebelumnya dan mempertahankan atau menumbuhkan kapasitas tersebut selama proses kolaborasi. Pengembangan kapasitas yang diperlukan ditentukan selama proses pergerakan prinsip. Kapasitas baru ini menjadi bentuk pemberdayaan kelompok sebagai perwujudan prinsip demokrasi yang mendasari kolaborasi. Kapasitas untuk tindakan bersama dijelaskan dengan kombinasi 4 elemen penting yaitu pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

b. Pengaturan procedural dan kelembagaan

Pengaturan prosedural dan struktur kolaborasi dibutuhkan dalam mengatur interaksi antar aktor kolaborasi. Dimensi dimensi pengaturan prosedural adalah aturan aturan umum (*ground rules*), protokol protokol dalam kegiatan (*operating protocol*), peraturan untuk membuat keputusan (*decision rules*) dan segala aturan berkaitan dengan prosedur. Pengaturan yang ada dalam kolaborasi awalnya berbentuk informal, namun seiring berjalannya waktu demi kepastian hukum maka dibutuhkan aturan yang formal seperti adanya pembentukan perundangan atau legal formal yang menjadi payung hukum kolaborasi. Pengaturan kelembagaan berfokus pada intra-organisasi dan interorganisasi yaitu pada cara cara aktor melakukan governing dan mengatur organisasinya sendiri dalam kegiatan kolaborasi sedangkan interorganisasi yaitu pada cara cara kelompok kolaborasi mengatur proses dan bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak eksternal. Struktur kolaborasi yang baik adalah yang fleksibel, tidak hirarki dan cenderung bersifat jejaring dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah atau kolaborasi dapat membuat struktur yang benar-benar baru. Meskipun sifatnya fleksibel, peraturan merupakan hal penting yang dibutuhkan. Untuk kolaborasi yang lebih besar dan kompleks serta durasi waktu yang cukup panjang maka struktur kelembagaan organisasi harus jelas dan harus ada pengaturan untuk administrasi dan manajemen kegiatan kolaborasi yang jelas pula.

5. Kepemimpinan

Peran pemimpin selama proses kolaborasi adalah sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, penginisiasi, fasilitator dan mediator, representasi aktor kolaborasi secara keseluruhan, distribusi pengetahuan, mendorong penggunaan teknologi, dan melakukan advokasi terhadap publik. Selain itu, peran pemimpin yang juga penting adalah bagaimana cara cara pemimpin untuk mendorong deliberasi, mengatasi konflik, dan meningkatkan determinasi para actor terhadap tujuan kolaborasi.

6. Pengetahuan

Pengetahuan adalah apa saja yang dibutuhkan dan berusaha untuk disediakan. Pengetahuan merupakan segala hal yang diperlukan untuk sesuatu yang disediakan. Pengetahuan adalah kombinasi dari informasi untuk menambah kapabilitas. Pengetahuan sangat mempengaruhi tindakankolaborasi. Yang terpenting dari komponen ini adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan kepada para aktor kolaborasi sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat sebagai nilai tambah untuk proses kolaborasi.

7. Sumber daya

Salah satu keuntungan dari kolaborasi adalah potensi untuk berbagi sumber daya yang tidak dimiliki dalam melakukan suatu hal yang baru. Sumber daya yang berguna dapat mencakup pendanaan, waktu, dukungan teknis dan logistik, bantuan administratif dan organisasi, keterampilan yang diperlukan untuk analisis atau implementasi dan keahlian lainnya. Kekuasaan juga dapat dipandang sebagai sumber daya karena seperti sumber daya lainnya, kekuasaan hampir selalu didistribusikan secara tidak merata ke seluruh peserta.

1.5.2 Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah proses yang melibatkan pengaturan atau pengawasan sampah, mulai dari pengumpulan, pemisahan, pemindahan, hingga pengelolaan dan pembuangan akhir.¹⁷ Apabila dilihat dari sumbernya, terdapat 2 golongan sampah padat, yaitu 1) Sampah organik yang merupakan hasil dari materi-materi hayati dan dapat terurai oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami. Sampah organik umumnya terdiri dari sisa makanan, limbah dapur, daun, tepung, sayuran, kulit buah, serta kemasan yang bukan terbuat dari kertas, karet, atau plastik. pasar tradisional juga tidak kalah dalam menghasilkan sampah publik; 2) Sampah non-organik atau anorganik adalah sampah yang berasal dari material non-hayati, baik yang dihasilkan dari produk sintetik maupun sisa dari proses ekstraksi bahan tambang. Kategori sampah anorganik mencakup logam dan produk olahannya, plastik, kertas, kaca, porselen, serta sampah deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami oleh lingkungan atau bakterie (*non-biodegradable*). Beberapa sampah anorganik lainnya membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. sampah berbahan plastic dan kaleng adalah contoh sampah anorganik yang biasa dijumpai di rumah tangga. Untuk mencapai tujuan kota yang bersih, sehat, dan teratur, sistem pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung satu sama lain.¹⁸

1.5.3 Bank Sampah

Bank Sampah adalah sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara kolektif. Sistem ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi melalui pengelolaan sampah. Dalam prosesnya, sampah yang memiliki nilai ekonomi akan dipilah, dikumpulkan, dan dikirimkan ke pasar. Bank Sampah juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, karena semua operasinya dirancang untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mendorong warga untuk

¹⁷ Hendra, Y. (2016). *Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah*. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial. 7(1), Hal 77-91.

¹⁸ Andini, I., Lukman, L., & Mannu, A. (2022). *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi. 10(1). Hal 8-14.

memisahkan dan mengelompokkan sampah sesuai jenisnya selama proses pemilahan. Contoh sampah yang dapat dipisahkan meliputi plastik, kertas, kaca, dan logam. Dengan demikian, Bank Sampah akan menciptakan budaya dan pola pikir baru yang mendorong masyarakat untuk memilah sampah, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.¹⁹ Manajemen Bank Sampah dilakukan secara sistematis, mencakup sosialisasi, pelatihan, pengelolaan gudang, manajemen produksi, serta pendaftaran dan pencatatan pelanggan, dan lain-lain.

Sistem Bank Sampah tidak hanya memberikan nilai ekonomi dan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bersih dan menghargai nilai dari sampah non-organik.²⁰ Sistem kerja Bank Sampah mirip dengan sistem perbankan pada umumnya, dengan perbedaan utama pada bentuk tabungannya yang berupa sampah. Bank Sampah menawarkan perubahan dengan mengubah tabungan sampah menjadi uang. Dengan memanfaatkan Bank Sampah, semua pihak akan mendapatkan keuntungan.

Dengan pengumpulan sampah di satu lokasi dan pemisahan yang telah dilakukan, lingkungan menjadi lebih bersih. Selain itu, pengepul dapat meraih keuntungan ekonomi dari penjualan sampah, yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan bersama di lingkungan setempat²¹. Bank sampah dibentuk dan dikembangkan melalui berbagai tahap, mulai dari sosialisasi awal, pelatihan teknis, hingga penerapan sistem, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan. Operasional bank sampah meliputi proses pemilahan, penyeteroran, pengembangan, pencatatan, serta pengangkutan sampah. Keuntungan dari sistem bank sampah dapat dihitung dengan mengalikan jumlah pelanggan dengan hasil penjualan minimum dalam sebulan, yang memberikan gambaran tentang omset bank sampah pada bulan pertama

¹⁹ Eka Utami, Buku Panduan “Sistem Bank Sampah” & 10 Kisah Sukses, Yayasan Unilever Indonesia, 2013, hlm 3-9

²⁰ Ibid

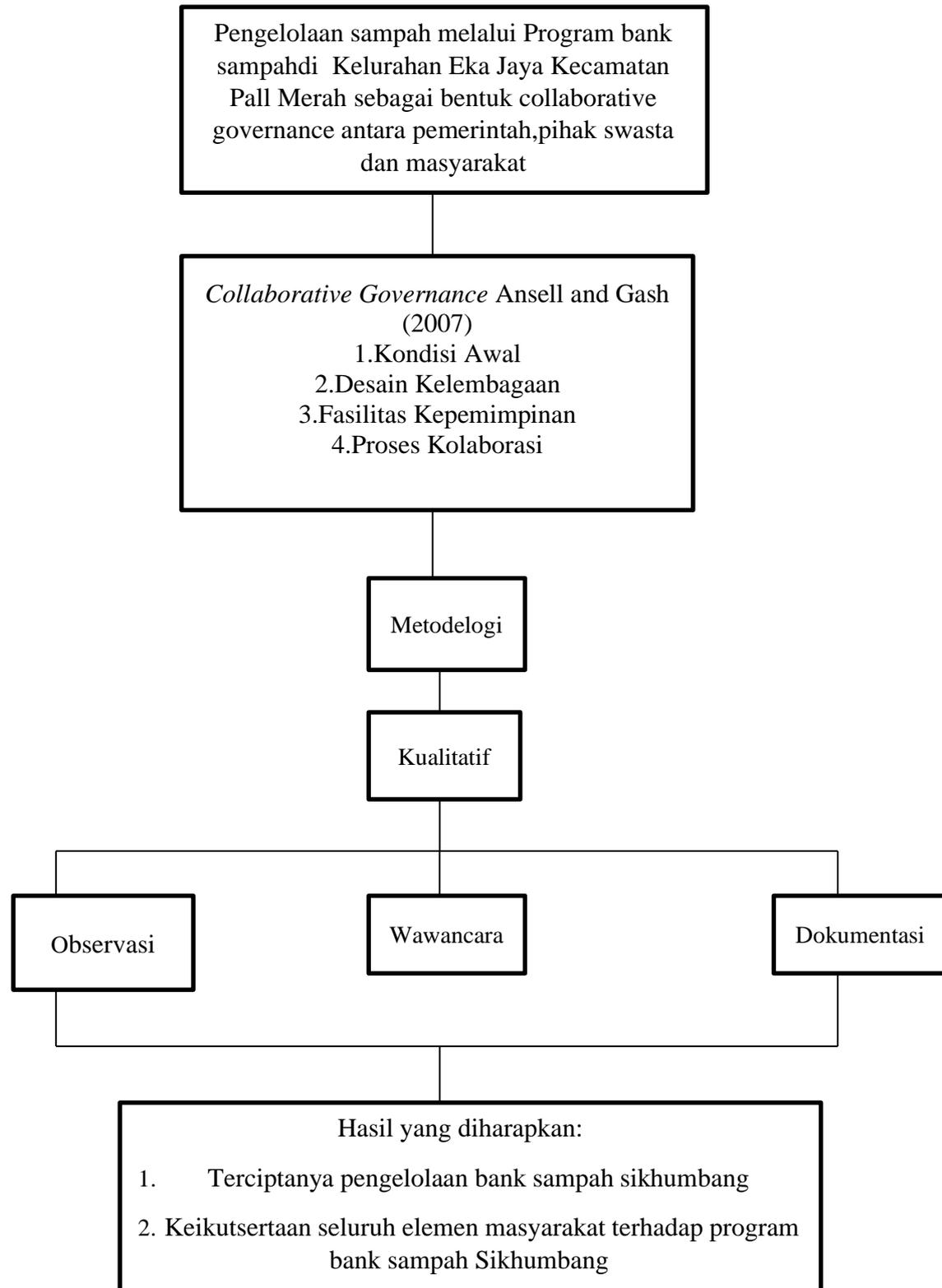
²¹ Eka Utami, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Bank sampah memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang signifikan, karena dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dalam pengelolaan operasional bank sampah serta memberikan peluang untuk berinvestasi melalui tabungan. Bank sampah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, bank sampah tidak bisa berdiri sendiri; keberhasilannya harus terintegrasi dengan gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) secara menyeluruh di masyarakat.²²

1.6 Kerangk pikir

Produksi sampah terus menerus meningkat dan menjadi permasalahan nasional yang menjadi tanggung jawab semua pihak dan melibatkan semua *stakeholder* dalam penanganannya dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi yang melibatkan baik organisasi public maupun swasta agar dalam penerapannya selaras dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah di Kota Jambi. Istilah lain dari kolaborasi adalah *collaborative governance* yang dapat diartikan sebagai suatu entitas yang terdiri dari pengetahuan di mana satu atau lebih lembaga pemerintah melibatkan pemangku kepentingan dan pihak non-pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan resmi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan pelaksanaan kebijakan publik, program, atau inisiatif tertentu.

²² Reni seswanti, *Partisipasi Warga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada Program bank sampah Di Kota Jambi*, Jurnal Pembangunan berkelanjutan, Vol.3, No.1, 2020, hlm.46.



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam analisis ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan dan upaya pemerintah dalam melakukan kolaborasi pengelolaan sampah berbagai jenis informasi yang diperoleh di penelitian lapangan menggunakan objektif dalam kaitannya melalui subjek penelitian, yaitu penerapan prinsip-prinsip penelitian pengendalian sampah secara kolaboratif di Kota Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Bank Sampah Sikhumbang JL Arjuna(Marene) RT 13 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menitikberatkan pada proses kolaboratif dalam pengelolaan Bank Sampah Sikhumbang yang berada di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Pall Merah, peneliti ingin mengetahui seperti apa saja hasil yang diterima dari kegiatan ini apakah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara langsung atau belum. Dalam hal ini peneliti telah mengetahui sebuah gambaran awal dari proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah ini adalah dengan terciptanya sebuah Program Bank Sampah Kelurahan yang mana dengan hal ini masyarakat bisa merasakan manfaat langsung secara tunai melalui penjualan produk sampah maupun masyarakat memiliki wawasan tambahan mengenai pengolahan produk olahan sampah.

1.7.4 Sumber Data

1.7.1 Data primer

Data primer merupakan data inti berupa kumpulan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian melalui sumber pertama, seperti responden atau informan, melalui proses wawancara, atau pengamatan langsung oleh peneliti sendiri.²³ Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan berbagai pihak.

b) Data Sekunder

Data skunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari sumber – sumber tertulis seperti dokumen, buku, jurnal, internet, dan jenisnya yang relevan untuk penelitian yang sedang dilakukan.²⁴

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Identifikasi informasi dalam penelitian ini menerapkan metode pengambilan sampel yang bertujuan. teknik purposive sampling ini merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan penggunaan responden sumber untuk tujuan khusus yang sama dengan topic penelitian karena individu tersebut dianggap sebagai pemegang data yang vital untuk penelitian.²⁵

²³ Lexy J. Moleong. (2006). “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung : PT Remaja Rosdakarya,. hlm: 158.

²⁴ *Ibid.* hlm 159.

²⁵ P.D.Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.’, 2017.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Firman Ariyanto	Kasi Pengendali Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah DLH Kota Jambi.
2.	Sugianto	Direktur bank sampah sikhumbang
3.	Abdul Salim	Lurah Eka Jaya
4.	Yanti	Masyarakat/nasabah
5.	Eko	Masyarakat/nasabah
6.	Sunarto	Masyarakat/nasabah

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses karena tujuan utama penelitian, Tahap paling krusial dalam penelitian adalah pengumpulan data. Jika peneliti tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengumpulkan data, mereka mungkin tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar studi dalam:

1. Observasi, yang juga dikenal sebagai pengamatan langsung, adalah proses dokumentasi fenomena yang sedang terjadi dengan cara yang teratur dan sistematis.²⁶ Untuk memperoleh dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti, observasi ini dapat digunakan untuk melihat situasi di lapangan secara langsung. Tujuan dari observasi yang berkaitan dengan judul yang dipilih adalah untuk

²⁶ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (edisi kedua), (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 86

2. Wawancara adalah proses dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.²⁷
3. Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian.²⁸

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data studi kualitatif yang dilakukan secara paralel dengan prosedur yang disusun untuk memperoleh data hingga tercapai kesimpulan yang memungkinkan pencapaian tujuan analisis data. Proses analisis data telah diselesaikan dengan tahapan seperti berikut:

a. Reduksi Data.

Pengurangan data merupakan proses pengambilan, pengecilan dan penyusutan data yang diperoleh pada saat observasi.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan penyusutan data dengan mengambil point penting yang ada maka Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data adalah dengan melakukan rangkuman keseluruhan point yang ada untuk di buat laporan yang di observasi sebelumnya

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Analisis data pada tahap ketiga yaitu verifikasi dan penarikan

²⁷ Sugiyono, Op.cit. hlm.233

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014)

kesimpulan .kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

1.7.8 Keabsahan Data

Mekanisme triangulasi merupakan perpaduan dari berbagai sumber data, personel, teori, serta teknik metodologis yang diterapkan dalam penelitian ataufenomena sosial.²⁹ Karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, triangulasi membantu meningkatkan validitas dalam menangkap realitas. Peneliti menggunakan Triangulasi Data dalam penelitian ini. Triangulasi tersebut mendukung tujuan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber data dalam satu studi.

Karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, triangulasi meningkatkan kevalitan dalam menggambarkan realitas. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Triangulasi Data. Metode triangulasi ini mendukung tujuan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber data dalam satu studi.³⁰

1. Triangulasi sumber

Triagulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi.

²⁹ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman

³⁰ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh dikantor dinas lingkungan hidup dan beberapa pemangku kepentingan yang berkolaborasi valid.